

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021

Rindana Rahmawati Kusumaningrum^{1*}, Siti Fatimah Nurhayati²

^{1,2} Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of gross regional domestic product, human development index, labor force participation rate, and average per capita expenditure on the district/city minimum wage in the Pekalongan residency in 2017-2021. This study uses secondary data in the form of panel data consisting of cross sections of 7 regencies in the Pekalongan Residency and time series for the period 2017-2021 using a statistical software tool, namely Eviews. The approach method used in estimating panel data for this study is the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study concluded that gross domestic product has a positive effect on district/city minimum wages, the human development index has no effect on district/city minimum wages, which means that this result rejects the initial hypothesis, while the labor force participation rate has a negative effect on district/city minimum wages. and the average per capita expenditure has a positive effect on the district/city minimum wage in the Pekalongan residency. The results of the F test indicate that the model exists. The R-squared is 0.9522, meaning that 95.22% of the variation in the district/city minimum wage variable can be explained by the GRDP, HDI, TPAK and average per capita expenditure variables. The remaining 4.78% is influenced by variables or other factors not included in the model

Keywords: *Minimum wage, gross regional domestic product, human development index, labor force participation rate, average per capita expenditure*

Copyright (c) 2023 Rindana Rahmawati Kusumaningrum

✉ Corresponding author :

Email Address : rrindana3@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian di semua negara, khususnya di Indonesia. Selama ini pemerintah hanya mempertimbangkan masalah ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah pertumbuhan angkatan kerja, namun lapangan kerja untuk sektor ini masih terbatas. Tenaga kerja merupakan pihak yang menawarkan jasa dan berperan penting dalam proses produksi sehingga berhak untuk menerima imbalan atas jasa yang diberikan berupa upah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), upah didefinisikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup seseorang.

Upah perlu ditingkatkan agar kualitas hidup pekerja dan keluarganya juga dapat meningkat. Upah dapat diberikan berdasarkan banyaknya waktu yang dikeluarkan maupun satuan barang yang mampu dihasilkan oleh pekerja. Dengan demikian, jika tingkat upah yang diberikan semakin tinggi maka pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup pekerja yang tercantum dalam pasal 88 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal ini menyebut pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun lewat undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, pasal ini telah dicabut. Pasal 25 pp 36/2021 yang merupakan turunan dari undang-undang cipta kerja menyebut upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan atau dengan kata lain berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menentukan upah minimum adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja sehingga ketika penawaran tenaga kerja diketahui, upah layak dapat disesuaikan untuk pekerja, karena upah biasanya dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Jika pasokan tenaga kerja meningkat, kelebihan pasokan tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal dengan upah yang tidak diatur dan pada akhirnya dapat menyebabkan upah yang lebih rendah. Selain menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja, produk domestik regional bruto juga digunakan dalam penetapan nilai upah minimum sebab tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap *profit* yang dihasilkan. Jika *profit* meningkat, maka tingkat upah minimum juga akan naik (Nurtiyas, 2016).

Karesidenan Pekalongan, merupakan wilayah administratif dengan pembagian wilayah kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang kabupaten Tegal, kabupaten Brebes, kota Pekalongan, dan kota Tegal.

Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Batang	1.603.000	1.749.900	1.900.000	2.061.700	2.129.117
Pekalongan	1.583.698	1.721.638	1.859.885	2.018.161	2.084.155
Pemalang	1.460.000	1.588.888	1.718.000	1.865.000	1.926.000
Tegal	1.487.000	1.617.000	1.747.000	1.896.000	1.958.000
Brebes	1.418.100	1.542.000	1.665.850	1.807.614	1.866.723
Kota Pekalongan	1.623.750	1.765.179	1.906.922	2.072.000	2.139.754
Kota Tegal	1.499.500	1.630.500	1.762.000	1.925.000	1.982.750

Sumber : BPS Jawa Tengah 2022

Masing-masing daerah menurut tabel 1 memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda. Upah minimum kabupaten di karesidenan Pekalongan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2021. Kota Pekalongan menjadi kota dengan rata-rata upah minimum yang paling tinggi se-karesidenan Pekalongan, sedangkan kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal,

kabupaten Brebes dan kota Tegal menjadi kabupaten/kota yang memiliki rata-rata upah minimum kabupaten terendah di karesidenan Pekalongan.

Kajian Ilham Kristanto (2013) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak (KHL) dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap upah minimum sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Sementara Daniel dan Rika (2021) dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa PDRB, inflasi, TPAK, IPM dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota Pematangsiantar. Hasil kajian lain dari Bersales dan Lucagbo (2014) dengan menggunakan analisis regresi data panel dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Philipina. Berbeda dengan kajian Utama et al., (2019) yang mengatakan bahwa variabel PDRB dan TPAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Sumbawa.

Perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya adalah modifikasi variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian dan tahun yang digunakan sehingga tujuan penelitian saya yaitu guna menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata pengeluaran perkapita terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021.

H1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021

H2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021

H3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021

H4 = Rata-rata pengeluaran perkapita berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021

H5 = PDRB, IPM, TPAK dan rata-rata pengeluaran perkapita secara simultan berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021

METODE

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, data diperoleh asal Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, dimana lokasi penelitian di Karesidenan Pekalongan pada tahun 2017-2021. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel terikat yaitu upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan dan variabel bebas yaitu produk domestik regional bruto, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rata-rata pengeluaran perkapita.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan data *cross section* 7 kabupaten di Karesidenan Pekalongan dan data *time series* pada periode tahun 2017-2021 dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak statistik yaitu Eviews. Dalam menganalisis regresi data panel menggunakan model ekonometrik sebagai berikut (Gujarati, 2015):

$$\log UMK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 \log PKP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (ribu rupiah)
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)
- TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
- PKP = Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)
- ε = Error term
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen
- I = Kabupaten/kota ke i di karesidenan Pekalongan
- T = Tahun ke t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least square (PLS)*, *Fixed effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* beserta uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross Section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	6.664770	-9.950266	3.509149
LogPDRB	0.056259	1.013116	0.173897
IPM	-0.004044	0.052014	0.013558
TPAK	0.020540	-0.009046	0.012600
LogPKP	0.412061	0.329994	0.449970
R^2	6.664770	0.952151	0.485208
Adjusted R^2	0.056259	0.932214	0.416569
Statistik F	4.500039	47.75821	7.069000
Prob. Statistik F	0.005746	0.000000	0.000391
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow Cross-section $F(6, 24) = 48,247961$; Prob. $F(6, 24) = 0,0000$			
(2) Hausman Cross section random $\chi^2(4) = 195,059244$; Prob. $\chi^2(4) = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah

Berdasar tabel 2 diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk enentukan model terestimasi *Pooled Least Square (PLS)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. H_0 uji Chow: model terestimasi adalah *Pooled Least Square (PLS)*, dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. H_0 diterima jika nilai p (p -value),

probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F > a$; H_0 ditolak bila nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F \leq a$.

Berdasar tabel 2, nampak bahwa nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 ($< 0,01$), jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi *Fixed Effects Model (FEM)* atau *Random Effects Model (REM)*. H_0 uji Hausman: model terestimasi adalah *Random Effects Model (REM)* dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effects Model (FEM)*. H_0 diterima jika nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 > a$; H_0 ditolak bila nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 \leq a$.

Berdasar tabel 2, nampak nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 sebesar 0,0000 ($< 0,05$), jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi adalah model *Fixed Effects Model (FEM)*.

Berdasar uji Chow dan uji Hausman, model *Fixed Effects Model (FEM)* terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *Fixed Effects Model (FEM)* tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

$\log \widehat{UMK}_{it} = -9,9503 + 1,013 \log PDRB_{it} + 0,0520IPM_{it} - 0,0090 TPAK_{it} + 0,3300 \log PKP_{it}$				
	(0,0227)**	(0,1594)	(0,0167)**	(0,0011)**
$R^2 = 0,9522; DW = 2,1435; F = 47,7582; Prob. F = 0,0000$				

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Keterangan:

*Signifikan pada $\alpha = 0,01$

**Signifikan pada $\alpha = 0,05$

*** Signifikan pada $\alpha = 0,10$

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Uji Kebaikan Model

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri (uji t). H_0 uji $t \beta_i = 0$ (variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan). H_A -nya $\beta_i \neq 0$ (variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan). H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > a$; H_0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t \leq a$. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	T	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
Log(PDRB)	2,435323	0,0227	$< 0,05$	Berpengaruh Signifikan pada $\alpha = 0,05$
IPM	1.452338	0,1594	$> 0,1$	Tidak Berpengaruh Signifikan

TPAK	0,0167	< 0,05	Berpengaruh Signifikan pada $\alpha = 0,05$
	-2.573929		
Log(PKP)	0,0011	< 0,05	Berpengaruh Signifikan pada $\alpha = 0,05$
	3.722609		

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasar tabel 4 nampak bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap UMK di karesidenan Pekalongan adalah PDRB dan PKP berpengaruh positif, TPAK berpengaruh negatif, sementara IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK di karesidenan Pekalongan.

Uji Eksistensi Model Terestimasi FEM (Uji F)

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Karena variabel independen dalam model ekonometrik ada empat, maka formulasi hipotesisnya: $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5 = 0$ (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis); $H_A : \beta_1 \neq \dots \neq \beta_5 \neq 0$ (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$.

Berdasar tabel 3, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,01$); jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi *Fixed Effects Model* (FEM) eksis.

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari Tabel 3 terlihat nilai R^2 sebesar 0,9522, artinya 95,22 % variasi variabel upah minimum kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, IPM, TPAK dan rata-rata pengeluaran perkapita. Sisanya, 4,78% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengaruh PDRB terhadap UMK di karesidenan Pekalongan

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4, terlihat variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten/kota (UMK) ketika koefisien regresi sebesar 1,013 beserta signifikansi empirik (ρ) sebesar 0,0227 ($< 0,05$). Pola hubungan PDRB dan UMK adalah logaritma-logaritma, artinya apabila produk domestik regional bruto meningkat sebesar 1 persen maka mampu meningkatkan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1,013 persen. Hasil ini mendukung kajian Ilham Kristanto (2011) yang menunjukkan hasil bahwa kebutuhan hidup layak (KHL) dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota.

Pengaruh IPM terhadap UMK di karesidenan Pekalongan

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4, terlihat variabel indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota (UMK) ketika koefisien regresi sebesar 0,0520 beserta signifikansi empirik (ρ) sebesar 0,1594 ($> 0,1$). Hasil ini tidak selaras dengan kajian Daniel dan Rika (2021) yang menunjukkan hasil bahwa PDRB, inflasi, TPAK, IPM dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota Pematangsiantar.

Pengaruh TPAK terhadap UMK di karesidenan Pekalongan

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4, terlihat variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota

(UMK) ketika koefisien regresi sebesar -0,0090 beserta signifikansi empirik (ρ) sebesar 0,0167 ($<0,05$). Pola hubungan TPAK dan UMK adalah logaritma-linier, artinya apabila tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,9 persen. Berbeda dengan penelitian Bersales dan Lucagbo (2014) yang menunjukkan hasil bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Philipina. Jika hasil bernilai positif, artinya tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat dapat menaikkan upah minimum yang akan diterima pegawai.

Pengaruh Rata-rata Pengeluaran Perkapita terhadap UMK di karesidenan Pekalongan

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4, terlihat variabel rata-rata pengeluaran perkapita (PKP) berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten/kota (UMK) ketika koefisien regresi sebesar 0,3300 beserta signifikansi empirik (ρ) sebesar 0,0011 ($<0,05$). Pola hubungan PKP dengan UMK adalah logaritma-logaritma, artinya apabila rata-rata pengeluaran perkapita naik sebesar satu persen maka upah minimum kabupaten/kota akan naik sebesar 0,3300 persen. Hasil ini mendukung kajian Daniel dan Rika (2021) yang menunjukkan hasil bahwa PDRB, inflasi, TPAK, IPM dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota Pematangsiantar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan rata-rata pengeluaran perkapita terhadap upah minimum kabupaten/kota dengan metode regresi data panel terpilih *Fixed Effect Model* dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten/kota, yang berarti bahwa peningkatan PDRB dapat memaksimalkan upah minimum; indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota; tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota, ini artinya apabila penawaran tenaga kerja meningkat maka dapat menurunkan upah minimum begitupun sebaliknya jika penawaran tenaga kerja menurun maka upah akan meningkat; rata-rata pengeluaran perkapita berpengaruh positif terhadap upah minimum kabupaten/kota, artinya semakin besar pengeluaran perkapita maka pendapatan juga akan meningkat.

Referensi :

- Bersales, Lisa Grace. 2014. Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines. *Statistics Journal: Philippines*. School of Statistics, University of the Philippines Diliman.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. (2021). *Pengeluaran Perkapita*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. (2021). *Upah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal ekuilnomi*, 3(1), 38-51.
- Gujarati, D. N.(2015). *Dasar – dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hutabarat, D. S. N. (2018). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Sumatera Utara. *Universitas Sumatra Utara*, 1, 1-108.
- Ilham Kistanto. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember. *Skripsi: Jember*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

- Keputusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Nurtyas, Febrika. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saberan, H (2002). *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Rajawali
- Sadono Sukirno. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman J., 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE-UI
- Sutama, I. N., Asmini, A., & Astika, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(3), 281-291.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Upah pasal 30
- Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.